

KEBIJAKAN PRESIDEN BARACK OBAMA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN IMIGRAN TERHADAP TINDAK PERDAGANGAN MANUSIA DI AMERIKA SERIKAT MELALUI *TRAFFICKING VICTIM PROTECTION ACT* TAHUN 2012-2016

***(President Barack Obama's Policy on Immigrant
Protection Against Human Trafficking in the United
States Through the Trafficking Victim Protection Act of
2012-2016)***

Desi Ratnasari & Rifqi Itsnaini Yusuf

*(Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Peradaban)*

desiratnasari2502@gmail.com & rifqi.itsnaini@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini berisikan mengenai analisis tentang kebijakan untuk menangani isu perdagangan manusia terhadap imigran di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Presiden Barack Obama serta usaha apa saja untuk menangani perdagangan manusia terhadap imigran di Amerika Serikat. Selanjutnya, skripsi ini juga menggunakan pendekatan kebijakan TVPA, dan kebijakan TVPA tersebut diperbarui lagi oleh Presiden Barack Obama dengan menambahkan prinsip *prevention, protection, prosecution*. Hasil dari penelitian ini adalah dengan menganalisis keberhasilan kebijakan TVPA yang sudah diperbarui oleh Presiden Barack Obama.

Kata Kunci : imigran, kebijakan, *prevention, protection, prosecution*.

ABSTRACT

This thesis analyzes the policy on human trafficking issue toward immigrant of the U.S under Barrack Obama's administration. This thesis aims to explore more about the policy and the effort to overcome human trafficking in the U.S. This thesis uses TVPA policy approach, and renewed with additional principles namely *prevention, protection, prosecution*. The result of this research is to analyze the success of the TVPA policy which has been updated by President Barack Obama.

Keywords: *immigrant, policy, prevention, protection, prosecution*.

PENDAHULUAN

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki relasi yang besar dengan berbagai negara di dunia. Dengan adanya relasi itulah yang membuat imigran semakin mudah datang ke Amerika Serikat. Kedatangan imigran tersebut berdampak bagi Amerika Serikat, salah satunya adalah peluang kejahatan yang semakin meningkat yaitu isu perdagangan manusia (Hakriswono, 2009).

Perdagangan manusia menjadi masalah yang signifikan bagi Amerika Serikat. Sekitar 14.500 hingga 17.500 orang, terutama perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan manusia ke Amerika Serikat setiap tahunnya. Amerika Serikat seringkali menjadi tujuan pelaku perdagangan manusia dengan korban yang berasal dari negara berkembang seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin (Hanifah, 2016).

Dalam perlawanan terhadap perdagangan manusia, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan Trafficking Victim Protection Act (TVPA). Pemberlakuan TVPA ini disetujui setelah melakukan voting dengan perolehan suara badan legislatif sebanyak 371-1 suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan 95-0 suara untuk Senat. TVPA ditandatangani menjadi hukum oleh Presiden William J. Clinton pada 28 Oktober 2000 (Pangestika, 2017).

Di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, pemerintah Amerika Serikat menjadikan upaya *anti-trafficking* sebagai prioritas Negara. Sebagai orang yang paling berpengaruh di Amerika Serikat, terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden menghapus kesenjangan sosial dan stigma perbudakan modern (Ryf, 2002).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori pengambilan keputusan. Dalam teori pengambilan keputusan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seperti posisi atau kedudukan, situasi, masalah, dan tujuan. Teori pengambilan keputusan digunakan untuk menganalisis isu perdagangan manusia, karena Presiden Barack Obama berperan sebagai aktor dalam pengambilan keputusan untuk mengambil langkah memerangi perdagangan manusia (Rosyidin, 2011).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah mengapa Presiden Barack Obama menggunakan Trafficking Victim Protection Act dengan prinsip 3P dalam upaya menangani perdagangan manusia di Amerika Serikat tahun 2012-2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dibuat oleh Presiden Barack Obama dengan memaksimalkan kebijakan TVPA menggunakan prinsip 3P dalam menangani perdagangan manusia di Amerika Serikat.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

yang alamiah, dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Dengan metode kualitatif yang berarti peneliti mengambil data dari berbagai literatur seperti dari jurnal, buku-buku, maupun dari situs resmi yang tersedia untuk dapat sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini (Sugiono, 2014).

Dengan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mengaplikasikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiono, 2014).

PEMBAHASAN

Imigran yang datang ke Amerika Serikat dari berbagai negara dibelahan dunia. Sehingga banyak sejarah imigran yang datang ke Amerika Serikat yaitu imigran dari Eropa. Imigran yang datang dari Eropa ini mengalami beberapa fase peristiwa tertentu, salah satunya ada imigran pada masa Arab Druze pada tahun 1860. Imigran pada masa Arab Druze merupakan kelompok keagamaan yang basisnya berada di Timur Tengah (Murrin, 2011). Selain imigran pada masa Arab Druze, juga ada tanda dari imigran pada masa abad transisi tahun 1880. Imigran pada masa abad transisi ini ditandai dengan bangsa Eropa yang mulai imigrasi ke Amerika Serikat sejak abad 16. Dan di abad 19 kaum imigran juga masih di dominasi oleh bangsa Eropa. Selain itu imigran dari bangsa Asia juga meningkat, maka dari itu dibentuk pengecualian untuk membendung jumlah kedatangan imigran pada tahun 1882 (HomamAltabaa, 2019).

Kedatangan imigran ke Amerika Serikat tidak hanya dari bangsa Eropa saja, tetapi ada juga imigran dari bangsa Afrika. Imigran Afrika yang datang ke Amerika Serikat ditandai dengan munculnya Muslim di Amerika Serikat tahun 1875-1967. Mereka yang memberikan inspirasi kepada sejumlah masyarakat Afro Amerika untuk memeluk Islam kemudian dikenal dengan *black moslem* (Wahyuni, 2018).

Selain itu, imigran dari Afrika juga ditandai dengan ketertarikan imigran Afrika terhadap konsep *American Dream*. Konsep *American Dream* merupakan mimpi orang Amerika, bangsa Amerika Serikat percaya bahwa Amerika Serikat dapat menjadi lebih baik. Dengan adanya kepercayaan tersebut, imigran Afrika beranggapan bahwa jika melakukan migrasi ke Amerika Serikat akan memiliki atau merubah kehidupan yang lebih baik lagi. Konsep *American Dream* sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, kondisi ekonomi, kondisi kekayaan alam, dan kondisi psikologis (Febri, 2010).

Dari tahun ke tahun imigran yang datang ke Amerika Serikat mengalami peningkatan

yang pesat. Memperbaiki keadaan ekonomi merupakan salah satu faktor utama terjadinya migrasi. Rata-rata dari imigran ini datang ke kota-kota besar di Amerika Serikat seperti New York, Texas, California, Florida, New Jersey, Nevada (Migration Policy Institute, 2016). Berikut merupakan tabel jumlah imigran Amerika Serikat pada tahun 1970-2016 :

Tabel. 1. Imigran Amerika Serikat Tahun 1970-2016

Tahun	Populasi Imigran Di Amerika Serikat (Juta)	Persentase Dari Total Populasi Di Amerika Serikat (%)
1970	9, 6	4, 7
1980	14, 1	6, 2
1990	19, 8	7, 9
2000	31, 1	11, 1
2010	40, 0	12, 9
2014	42, 4	13, 3
2015	49, 8	15
2016	44, 5	13, 5

Sumber: *Migration Policy Institute*, 2016

Dari data di atas dapat dilihat imigran Amerika Serikat sejak tahun 1970 sebanyak 9,6 juta jiwa, dan meningkat dari tahun ke tahun sampai di tahun 2016 menjadi 44,5 juta jiwa. Lalu jika dalam persentase pada tahun 1970 jumlah imigran sebanyak 4,7% dan meningkat sampai di tahun 2016 sebanyak 13,5% (Migration Policy Institute, 2016).

Jalur yang dilewati oleh imigran pun berbagai macam wilayah, seperti melewati jalur Meksiko, Arizona, Texas, dan California (Wilson, 2011). Mereka yang melakukan migrasi lewat jalur tersebut dengan status ilegal atau tidak berdokumen. Hal tersebut memunculkan dampak negatif bagi imigran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko ataupun bagi jalur perbatasan yang lainnya. Karena keadaan tersebut digunakan oleh pelaku perbudakan. Mereka para pelaku perbudakan melakukan perdagangan seks terhadap korban, imigran dengan alih-alih untuk melunasi hutang. Perbudakan itu yang sekarang menjadi perdagangan manusia (Voice of America, 2018).

Perdagangan manusia di Amerika Serikat sudah terjadi sejak jaman koloni Belanda pada tahun 1595, kemudian muncul paradoks tentang budak di Amerika Serikat pada tahun 1660. Selanjutnya terjadi perdagangan manusia dari Afrika pada tahun 1970. Dari zaman tersebut budak-budak sudah dipekerjakan secara keras di sektor perkebunan maupun industri Amerika. Dengan adanya perbudakan yang sudah ada sejak dahulu tersebut, Amerika Serikat pada masa sekarang menjadi tempat atau salah satu negara yang marak akan perdagangan manusia. Hal tersebut dikarenakan banyaknya imigran yang datang ke Amerika Serikat dan banyak juga yang mengalami penipuan atau menjadi korban perdagangan manusia (Gray, 2005).

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan bahwa sekitar 600.000 hingga 800.000 korban diperdagangkan setiap tahun melintasi perbatasan internasional di

seluruh dunia dan sekitar setengah dari korban ini berusia dibawah 18 tahun. Perdagangan manusia di Amerika Serikat ini memiliki tujuan tertentu bagi para pelaku, seperti perdagangan seks komersial dan perdagangan tenaga kerja paksa. Selain itu, faktor penyebab dari terjadinya perdagangan manusia ini sendiri adalah warisan masalah di Amerika Serikat, rendahnya pendidikan, dan juga perbudakan modern. Sedangkan motif dari perdagangan manusia di Amerika Serikat sendiri terdapat seperti tujuan pengiriman korban, bentuk eksploitasi, maupun berdasarkan korbannya (U.S. Department of State, 2006).

Pada 25 September 2012, Presiden Barack Obama menyampaikan kebijakan utamanya di Clinton Global Initiative (CGI) tentang upaya pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri perdagangan manusia. Presiden Barack Obama meminta kongres untuk mengesahkan kembali Trafficking Victim Protection Act of 2000. Dimana dalam memperbarui kebijakan TVPA tersebut, Presiden Barack Obama mengimplementasikan prinsip prevention, protection, prosecution untuk diterapkan dalam kebijakan TVPA dalam upaya menangani perdagangan manusia di Amerika Serikat (UNODC, 2014).

Dalam TVPA pemerintah Amerika Serikat menetapkan empat standar-standar minimum yang wajib dipatuhi oleh negara-negara dalam upaya pemberantasan praktik kejahatan perdagangan manusia. Kemudian negara-negara dalam sistem internasional dikategorikan ke dalam peringkat atau tier berdasarkan upaya yang dilakukan pemerintah negara dalam memenuhi standar minimum yang ditetapkan TVPA. Peringkat atau tier-tier tersebut terdiri dari tier 1, tier 2, tier 2 watch list, dan tier 3. Apabila negara yang tidak dapat memenuhi standar minimum TVPA tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa embargo ekonomi oleh Amerika Serikat terhadap negara tersebut (Behke, 2015).

Isu perdagangan manusia di Amerika Serikat melibatkan banyak korban termasuk orang dewasa dan anak-anak. Korban perdagangan manusia di Amerika Serikat mereka dijadikan untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku, seperti dijadikan *sex trafficking* dan tenaga kerja paksa. Maka dari itu dengan adanya kebijakan TVPA dengan menggunakan prinsip 3P (*prevention, protection, prosecution*) yang diteruskan pada masa pemerintahan Barack Obama yang kedua diharapkan dapat menurunkan perdagangan manusia di Amerika Serikat (TIP Report, 2016).

Presiden Barack Obama mengupayakan pemerintah Amerika Serikat untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga di Amerika Serikat untuk memerangi perdagangan manusia. Lembaga-lembaga tersebut seperti *Departemen of State (DOS)*, *Departemen of Defence (DOD)*, *Departemen of Justice (DOJ)*, *Departemen of Agriculture (DOA)*, *Departemen of Labour (DOL)*, *Departemen of Health and Human Service (HHS)*, *Departemen of Transportation (DOT)*, *Departemen of Education (DOE)*, *Departemen of Homeland Security (DHS)*, *Domestic Policy Council (DPC)*, *National Security Council (NSC)*,

Office of the Director of National Intelligence, Federal Bureau of Investigation, US Agency for International Development, US Equal Employment Opportunity Commission (TIP Report, 2016).

Adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut, masa pemerintahan Presiden Barack Obama yang kedua menghasilkan keberhasilan dalam memerangi perdagangan manusia. Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai Presiden Barack Obama dalam menangani perdagangan manusia Amerika Serikat Tahun 2012-2016 sebagai berikut :

1. Menyelidiki dan Mengadili Pelaku Perdagangan Manusia dan Jaringannya.

DOJ, DHS, DOL membentuk berkolaborasi dengan *Assertive Community Treatment Teams* (ACTTeams) untuk mengembangkan investigasi dan penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia. Pada tahun 2014, DOJ terus mengembalikan catatan hasil penuntutan. Mengamankan 184 pelaku perdagangan manusia terdiri dari 157 melibatkan perdagangan seks dan 27 perdagangan tenaga kerja. Pada tahun 2014, DHS/ICE/HSI mengidentifikasi lebih dari 440 korban perdagangan manusia dan dibuka sekitar 1.000 kasus dengan 828 vonis terhadap pelaku perdagangan manusia (U.S. Laws on Trafficking in Persons, 2015).

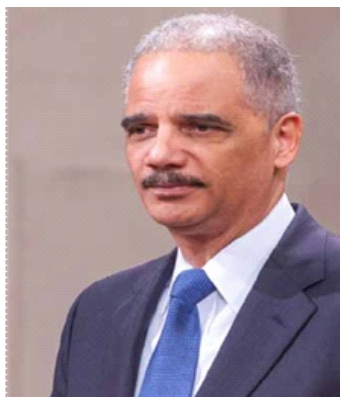


Foto 1. Mantan Jaksa Agung AS Eric Holder berbicara di Acara Bulan Pencegahan Perbudakan Nasional dan Perdagangan Manusia Departemen Kehakiman pada 29 Januari 2015. Sumber : Departement of State, 2015

Selain itu, DOJ menangkap pelaku 351 kejahatan kekerasan terhadap anak, dimana 15 orang telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Di Honduras, sebuah proyek DOJ yang didanai DOS menyarankan bekerjasama dengan *Honduran Attorney General's Office* (Kantor Kejaksaan Agung Honduras), unit pemeriksaan kedutaan AS, dan *U.S Attorney's Office* (Kantor Kejaksaan AS) untuk Distrik Selatan Florida untuk membongkar jaringan perdagangan manusia internasional (U.S. Laws on Trafficking in Persons, 2015).

2. Meningkatkan identifikasi korban dan pemberian bantuan dan pelayanan bagi semua korban perdagangan manusia

Pada tahun 2014, HHS memberikan \$7,4 juta untuk menyediakan manajemen kasus yang komprehensif bagi korban imigran dan calon korban perdagangan manusia yang

mencari sertifikasi HHS, dan dilayani 1.137 klien warga negara asing. HHS menerbitkan 530 Surat Sertifikasi untuk orang dewasa berkewarganegaraan asing dan 219 Surat Kelayakan untuk anak berkewarganegaraan asing. Dan tahun 2014 HHS juga memberikan \$1.435.000 untuk meningkatkan ketersediaan kasus yang komprehensif manajemen dan pelayanan korban kepada korban perdagangan manusia domestik, serta untuk mengurangi kerentanan terhadap perdagangan seks dan tenaga kerja di antara populasi berisiko (Departement of State, 2015).

3. Meningkatkan Pelatihan Para Pemangku Kepentingan, Termasuk Masyarakat Sipil, Penegak Hukum, dan Pejabat Pemerintah, untuk Identifikasi Korban

DHS berkolaborasi dengan DOJ, FBI, dan DOL untuk mengadaptasi kemajuan multi-disiplin program pelatihan untuk satuan tugas negara bagian dan lokal tentang cara melakukan investigasi perdagangan manusia dengan benar dan menawarkan layanan dari pendekatan yang berpusat pada korban. Mereka dilatih mengidentifikasi korban perdagangan manusia guna mengetahui pemenuhan kebutuhan korban perdagangan manusia (Departement of State, 2015).



Foto 2. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Jeh Johnson berbicara kepada media pada Februari 2015. (Sumber: Departement of State, 2015)

Selama tahun 2015, DHS CISOMB melibatkan organisasi berbasis masyarakat, imigran penyedia layanan, dan lembaga penegak hukum melalui 13 pertemuan tatap muka di delapan negara bagian yang berbeda dan online tentang perlindungan imigrasi bagi korban perdagangan dan kejahatan lainnya, dengan fokus pada program visa T dan U. HHS juga merintis pelatihan anti-perdagangan manusia Health and Wellness untuk medis dan penyedia layanan kesehatan di lima lokasi, dan mengevaluasi pelatihan untuk menginformasikan perluasan program (Departement of State, 2015).

4. Mendorong Pemerintah Asing untuk Memerangi Perdagangan Manusia dengan Melalui Diplomasi dan Keterlibatan Internasional

Pada bulan Juni 2014, DOS merilis tahunan laporan perdagangan manusia, menggambarkan upaya anti- perdagangan manusia dan memeringkat 188 negara dan wilayah, termasuk Amerika Serikat. Dengan demikian, DOS mewakili Amerika Serikat di berbagai pertemuan multilateral dan negosiasi manusia resolusi hak untuk mendorong pemerintah melindungi korban, serta menyoroti tren dan praktik Amerika Serikat, termasuk langkah-langkah untuk mencegah perdagangan barang milik pemerintah. (U.S. Laws on Trafficking in Persons, 2015).

DHS, DOJ, dan DOS menyelenggarakan seminar perdagangan manusia di Meksiko selama sekitar 100 peserta dari Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian, Polisi Federal, dan Institut Imigrasi Nasional untuk meningkatkan kerjasama anti-perdagangan manusia AS-Meksiko. Selain itu, DOD terus bekerja dengan personel militer mitra asing, termasuk yang dikerahkan ke operasi penjaga perdamaian PBB, untuk menawarkan pelatihan praktik terbaik anti-perdagangan manusia (Departement of State, 2015).



Foto 3. Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat Thomas E. Perez menyelenggarakan Upacara Penghargaan Iqbal Masih untuk menganugerahkan penghargaan tahunan Departemen untuk penghapusan Pekerja Anak pada 2 Desember 2014. (Sumber : Departement of State, 2015)

Selain itu, DOL terus menerapkan 11 kemitraan konsulernya, lima di antaranya diperbarui pada November untuk memastikan bahwa pekerja asing di Amerika Serikat diberi tahu tentang hak-hak buruh mereka, mengadakan acara penjangkauan terkoordinasi sepanjang tahun. Dan juga DHS yang menyampaikan seminar peningkatan kapasitas perdagangan manusia kepada 1.454 hukum asing petugas penegak hukum di 15 negara yang berbeda (Departement of State, 2015).

5. Jalin dan Perkuat Kemitraan dan Bentuk Kerjasama Lainnya untuk Memerangi Perdagangan Manusia

Pada forum Januari 2015 tentang memerangi perdagangan manusia di rantai

pasokan yang mempertemukan para pemimpin dari sektor swasta, LSM, dan pemerintah federal untuk membahas pencegahan perdagangan manusia dalam kontrak federal dan rantai pasokan sektor swasta. Kemitraan untuk Kebebasan, kemitraan publik-swasta dengan DOJ, HHS, HUD, dan LSM Humanity United, mengumumkan finalis dan penerima penghargaan untuk kompetisi inovasi pertama yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dukungan bagi para penyintas perdagangan manusia (TIP Report, 2016).



Foto 4. Penasihat Senior Presiden Valerie Jarrett menghadiri Acara Cuti Berbayar Champions of Change pada 16 April 2015. (Sumber : Departement of State, 2015).

Dan juga DHS menyelenggarakan forum perdagangan manusia yang mempertemukan Agen Khusus dan Korban Spesialis Pendampingan dari 26 kantor lapangan, serta berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti DOJ, DOL, DOS, dan LSM *anti-trafficking*. Selain itu, DOS mendukung sebuah proyek untuk membantu para pemuda yang selamat dari perdagangan manusia di Etiopia, India, Meksiko, dan Vietnam (TIP Report, 2016).

6. Mendanai Korban Perdagangan Manusia Domestik dan Internasional, Berfokus Pada Identifikasi Korban, Pencegahan, dan Penjangkauan

DOS, DOL, dan USAID, melanjutkan untuk berkolaborasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hibah internasional dan domestik dan prioritas pendanaan untuk menginformasikan keputusan pendanaan dan untuk memastikan program bersifat strategis dan tidak duplikasi. HHS juga mendanai *National Human Trafficking Resource Center* (Pusat Sumber Daya Perdagangan Manusia Nasional) (NHTRC), sebuah hotline rahasia nasional, bebas pulsa (1-888-373-7888) yang memberikan akses kepada korban perdagangan manusia ke dukungan dan layanan penting untuk mendapatkan bantuan dan tetap aman, dan melengkapi komunitas anti-perdagangan manusia dengan alat untuk secara efektif memerangi segala bentuk perdagangan manusia (U.S. Laws on Trafficking in Persons, 2015).



Foto 5. Menteri Transportasi AS Anthony Foxx berbicara di Festival Ide Aspen Institut Aspen pada Juli 2015. (Sumber : Departement of State, 2015).

HHS memberikan bantuan sebesar \$2,55 juta di bawah *Rescue & Restore Victims of Human Trafficking Program Regional* kepada 18 organisasi untuk memimpin atau berpartisipasi dalam koalisi anti-perdagangan manusia, untuk melakukan kegiatan penyadaran masyarakat, dan untuk memberikan pelatihan dan bantuan teknis tentang masalah perdagangan manusia kepada organisasi-organisasi lokal. Pada tahun 2014, penerima hibah melatih responden pertama dan profesional dan mengidentifikasi 833 calon korban perdagangan manusia (Departement of State, 2015).

7. Integrasikan Program Anti Perdagangan Manusia Dalam Negeri yang Relevan dengan Program Pemerintah

OMB, DOS, dan DOL, mengumpulkan data tentang sektor-sektor yang paling berisiko terhadap aktivitas terkait perdagangan manusia dalam kontrak federal dan rantai pasokan global, dengan tujuan membantu lembaga menerapkan kontrol dan pelatihan untuk meningkatkan pemantauan dan kepatuhan guna mencegah perdagangan manusia (Departement of State, 2015).



Foto 6. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter berbicara kepada personel Pentagon pada Februari 2015. (Sumber : Departement of State, 2015).

HHS menyangar hampir 58.000 *Unaccompanied Children* (UAC) (anak tanpa

pendamping) pada tahun 2014 untuk korban perdagangan manusia, memberikan layanan penempatan kepada UAC yang menjadi sasaran perdagangan manusia, dan melakukan beberapa pelatihan untuk menanggapi korban perdagangan anak asing untuk program negara bagian UAC (TIP Report, 2016).

8. mensosialisasikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia

Komite Penyadaran dan Penjangkauan Publik SPOG, yang diketuai bersama oleh DOS, HHS, dan DHS, mengembangkan pesan umum kepada publik, termasuk melalui perangkat media sosial untuk agen federal untuk memperkuat *National Slavery and Human Trafficking Prevention Month* (Pencegahan Perbudakan Nasional dan Perdagangan Manusia) terlibat dengan pemangku kepentingan; dan mulai mengembangkan penjangkauan ke populasi yang rentan. Dengan DOT yang mengembangkan materi kesadaran publik yang disesuaikan dengan industri transportasi (Departement of State, 2015).



Foto 7. Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat Sylvia Burwell mengadakan diskusi meja bundar di Boston Medical Center pada 28 April 2015. (Sumber : Departement of State, 2015).

EEOC juga bermitra dengan organisasi berbasis komunitas yang didedikasikan untuk pekerjaan anti-perdagangan manusia dan menyelenggarakan sekitar 244 acara penjangkauan anti-perdagangan manusia, menjangkau lebih dari 12.590 peserta selama periode pelaporan (TIP Report, 2016).

9. Pacu Inovasi dan Tingkat Kapasitas untuk Mengurangi Perdagangan Manusia Melalui Pengumpulan Data dan Penelitian

Transportation Security Administration (Administrasi Keamanan Transportasi) (TSA) DHS mengambil langkah untuk menambahkan "perdagangan manusia" sebagai jenis insiden dalam database *Emergency Operations Center* (Pusat Operasi Darurat) berbasis web untuk meningkatkan pemahaman TSA tentang kejahatan tersebut (U.S. Laws on Trafficking in Persons, 2015).



Foto 8. Jaksa Agung Amerika Serikat Loretta E. Lynch dan Menteri Tenaga Kerja AS Thomas E. Perez mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan langkah selanjutnya dari Inisiatif Tim Koordinasi Anti-Trafficking (ACTeam) pada 25 Juni 2015. (Sumber : Departement of State, 2015).

Langkah dari DHS mulai mengembangkan Aplikasi Seluler *Human Trafficking Toolkit* untuk memberikan hukum penegakan hukum dan pengguna lain akses mudah ke titik kontak utama, undang-undang yang relevan, dan peluang pelatihan (U.S. Laws on Trafficking in Persons, 2015).

10. Mengumpulkan intelijen yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan jumlah penuntutan dan perdagangan manusia domestik dan internasional

Komunitas Intelijen, badan-badan PITF, dan *Human Smuggling and Trafficking Center* (Penyelundupan dan Perdagangan Manusia Center) (HSTC) terus membangun proses untuk meningkatkan, meninjau, dan berbagi pelaporan intelijen dengan fokus pada pencegahan perdagangan manusia, melindungi korban, dan memajukan penuntutan (TIP Report, 2016).



Foto 9. Tina Tchen, Asisten Presiden dan Kepala Staf Ibu Negara Michelle Obama, berbicara di Universitas George Washington pada November 2014. (Sumber : Departement of State, 2015).

Bekerja sama dengan *Law Enforcement Working Groups* (Kelompok Kerja Penegakan Hukum) di sembilan pos luar negeri, DOS memimpin sebuah inisiatif dengan para ahli lain yang berbasis di Washington untuk melatih sekitar 2.000 pegawai pemerintah Amerika Serikat agar lebih memahami masalah perdagangan manusia dan meningkatkan pembagian informasi terkait perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara tuan rumah (TIP Report, 2016).

Keberhasilan dalam memerangi perdagangan manusia pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama tersebut tidak lepas dari campur tangan lembaga-lembaga di Amerika Serikat. Mereka membantu mencegah maupun memerangi kejahatan perdagangan manusia baik domestik maupun internasional. Dalam hal ini Presiden Barack Obama memperbarui lagi kebijakan TVPA tersebut merupakan sebagai langkah atau strategi dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia di Amerika Serikat (TIP Report, 2016).

Selain itu, keberhasilan-keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari prinsip *prevention*, *protection*, *prosecution* yang digunakan Presiden Barack Obama dalam memberantas perdagangan manusia di Amerika Serikat. Prinsip 3P tersebut seperti :

1. *Prevention*

Presiden Barack Obama selalu berusaha dalam upaya mengurangi perdagangan manusia yang terjadi di Amerika Serikat. Dengan pembaruan kebijakan TVPA dengan menggunakan prinsip 3P yang pertama yakni *prevention* (pencegahan), Presiden Barack Obama menggunakan berbagai langkah-langkah seperti menerapkan pamflet "*You Right Know*" yang merupakan sebuah layanan terhadap korban perdagangan manusia baik yang sudah menjadi korban ataupun yang selamat dari perdagangan manusia. Pamflet tersebut jalankan oleh LSM, dan mereka juga di danai dalam kampanye pamflet tersebut. Pamflet tentang penyuaaran perlindungan terhadap korban perdagangan manusia itu juga merupakan salah satu usaha Presiden Barack Obama dalam mengurangi angka perdagangan manusia yang terjadi di Amerika Serikat (Lerwongrat, 2018).

Selain dengan pamflet, Presiden Barack Obama juga menerapkan kebijakan langkah-langkah yang termasuk dalam *prevention* yaitu dengan meningkatkan kesadaran akan berbahanya perdagangan manusia. Dengan begitu, Presiden Barack Obama memerintahkan departemen pendidikan diharapkan untuk selalu ikut serta dalam upaya memerangi perdagangan manusia dan melakukan sosialisasi di berbagai komunitas pendidikan dengan penekanan khusus. Hal tersebut dilakukan karena yang rentan menjadi korban perdagangan manusia adalah sebagaian besar dari pelajar (Lerwongrat, 2018).

2. *Protection*

Kebijakan Presiden Barack Obama dalam memberikan perlindungan terhadap korban

perdagangan manusia dengan menerapkan prinsip 3P pada kebijakan TVPA yang telah diperbarui akan dapat mengurangi angka perdagangan manusia yang terjadi di Amerika Serikat. Perlindungan tersebut dapat berupa memberikan izin tinggal lebih lama bagi korban perdagangan manusia dan meningkatkan pelayanan terhadap korban perdagangan manusia. Dengan memberikan izin tinggal lebih lama, korban perdagangan manusia yang rentan merupakan imigran akan ditempatkan pada tempat tinggal yang nyaman, dimana lebih jauh dari pelaku. Hal tersebut dilakukan hanya untuk melindungi korban dari rasa takut maupun trauma mereka setelah menjadi korban perdagangan manusia (Lerwongrat, 2018).

Selain itu, program Presiden Barack Obama dalam menangani perlindungan bagi korban perdagangan manusia adalah dengan memberikan sertifikasi bagi para korban. Sertifikasi tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk mengajukan tunjangan atau layanan bagi korban perdagangan manusia yang parah. Program tersebut mewajibkan negara untuk memberikan hal yang sama pada anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Bentuk pelayanan tersebut berupa bantuan pengasuhan, dan pelayanan yang tersedia untuk pengasuh anak. Dengan kebijakan TVPA melalui prinsip 3P ini, LSM terus menyerukan perluasan layanan, termasuk layanan hukum untuk anak-anak warga negara asing tanpa pendamping maupun tanpa imigrasi yang sah, setelah mereka dibebaskan dari pengasuhan (Lerwongrat, 2018).

3. Prosecution

Prinsip 3P yang ketiga dari kebijakan TVPA yang sudah diperbarui oleh Presiden Barack Obama adalah prosecution (penuntutan). Dalam hal ini Presiden Barack Obama membuat kebijakan bagi pelaku perdagangan manusia dan dengan adanya kebijakan yang sudah diperbarui tersebut, pelaku perdagangan manusia akan dituntun sesuai dengan perbuatannya. Jenis hukuman yang diperoleh pelaku berbagai macam, dan semakin besar atau semakin kejam perbuatan pelaku dalam melakukan eksploitasi, maka semakin berat pula hukuman yang didapatkan pelaku perdagangan manusia tersebut (Lerwongrat, 2018).

Isu kejahatan perdagangan manusia selalu meningkat setiap tahun, dan menjadikan Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan isu perdagangan terbesar di dunia. Sedangkan korban perdagangan manusia tersebut tidak hanya dari Amerika Serikat saja, namun banyak juga imigran yang datang ke Amerika Serikat dan menjadi korban perdagangan manusia.

Presiden Barack Obama memperbaiki pelayanan terhadap korban perdagangan manusia dan beberapa departemen di Amerika Serikat juga sudah sadar betapa bahayanya isu perdagangan manusia. Dengan kebijakan prinsip 3P pada TVPA yang dilakukan Presiden Barack Obama tidak hanya dapat dilakukan di Amerika Serikat saja, namun dapat diterapkan di negara-negara lain untuk menangani isu perdagangan manusia. Prinsip 3P tersebut

menjadi patokan atau landasan dasar untuk negara terbagi menjadi di suatu tingkatan atau tier dalam penanganan isu perdagangan manusia.

Teori Pengambilan Keputusan dapat digunakan untuk menganalisa kebijakan-kebijakan oleh Presiden Barack Obama selaku aktor dengan menerapkan prinsip 3P pada TVPA dapat memerangi perdagangan manusia di Amerika Serikat. Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Barack Obama untuk menanggulangi perdagangan manusia adalah masalah yang logis dan rasional karena isu perdagangan manusia ini merupakan masalah yang serius dan harus diselesaikan karena mengancam keamanan negara.

KESIMPULAN

Banyaknya imigran gelap tersebut yang menjadikan perbudakan di Amerika Serikat semakin meningkat, perdagangan manusia merupakan nama lain dari perbudakan modern. Amerika Serikat sudah memperkerjakan budak sejak jaman koloni, mereka dipekerjakan dalam sektor perkebunan, pertanian dan teknologi. Tetapi seiring perkembangan jaman dan teknologi para budak tersebut dipekerjakan dengan paksa tanpa upah. Tidak hanya itu, para budak banyak juga yang dijadikan perdagangan seks oleh pelaku perdagangan manusia.

Isu perdagangan manusia di Amerika Serikat dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama yang pertama penanganan perdagangan manusia di Amerika Serikat belum mengalami penurunan. Sehingga Presiden Barack Obama memperbaiki kebijakan dalam menangani perdagangan manusia tersebut dengan cara memperbaiki TVPA dengan menerapkan prinsip *prevention, protection, prosecution*. Dengan menggunakan prinsip 3P tersebut, Presiden Barack Obama dapat memerangi perdagangan manusia di Amerika Serikat.

SARAN

Presiden Barack Obama dalam menangani isu kejahatan perdagangan manusia ini sudah cukup baik, yakni dengan menggunakan prinsip *prevention, protection, dan prosecution* di TVPA tersebut. Walaupun kebijakan yang baru tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan perdagangan di Amerika Serikat, namun Presiden Barack Obama menggunakan langkah 3P itu dengan maksimal untuk mengurangi angka perdagangan manusia di Amerika Serikat. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang sudah diperbarui oleh Presiden Barack Obama diharapkan dapat terus digunakan untuk memerangi perdagangan manusia baik di Amerika Serikat sendiri maupun di negara-negara lain. []

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Behke, A.M. (2015) *Up for Sale: Human Trafficking and Modern Slavery*. USA: Twenty-First Century Books.
- Gray, W. (2005). *Garis Besar Sejarah Amerika Serikat*. Washington D.C: International Departemen Luar Negeri AS.
- Hommam Altabaa, A. H. (2019). *Kreativitas Kaum Imigran dalam Konteks Historis*. Kuala Lumpur: Studi Pustaka.
- Leonard, T. &. (2012). *The International Trafficking of Human Organs: A Multidisciplinary Perspective*. Florida: Florida: CRC Press.
- Murrin, J. M. (2011). *Liberty, Equality, Power: A History of the American People*. Boston: Wadsworth.
- Wilson, C. (2011). *A Dividing Lines That Unites: U.S-Mexico Border*. US: Mexico: Wilson Center Mexico Institute.
- Departement of State. (2015). Progress in Combating Trafficking in Persons: The U.S. Government Response to Modern Slavery. United State: A/GIS/GPS.TIP Report.
- (2016). Trafficking in Person Report. United State: Departement of State.U.S. Department of State. (2006). Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in persons report. Washington, DC: Government Printing Office.

Jurnal

- Hakriswono, H. (2009). Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 323.
- Hanifah, U. U. (2016). Implementasi Trafficking Victim Protection Act (TVPA) Oleh Pemerintahan Barack Obama Dalam Menangani Human Trafficking di Meksiko Tahun 2008-2012. *Journal of International Relations*, 25-37.
- Okta Rahasti Pangestika. (2017). Efektivitas Implementasi Trafficking Protection Act of 2000 (TVPA) Oleh Amerika Serikat Dalam Menangani Perdagangan Manusia Global Tahun 2000 - 2016. *Jurnal Global & Policy*, 141-164.
- Rosyidin, M. (2011). Integrasi Struktur dan Unit : Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Realisme Neoklasik. *Jurnal Global*, 12-31.
- Ryf. (2002). The First Modern Anti-Slavery Law: The Trafficking Victims Protection Act of 2000. *Case Western Reserve Journal of International Law Vol. 34*, 45 - 71.
- Sugiono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. *Jurnal Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 247.
- Wahyuni, A. S. (2018). Historitas Potret Islam di Amerika Serikat. *Jurnal Asketik*, 79-88.

Website

- Febri. (2010, Juni 26). *Makna dari American Dream*. Retrieved from word press: <https://endless722.wordpress.com/2010/07/26/makna-dari-american-dream/>. Diakses pada 29 Juli 2021.
- Migration Policy Institute. (2016, Mei 1). *Frequently Requested Statistics on Immigrants and*. Retrieved from <http://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statisticsimmigrants->. Diakses pada 6 Juli 2021.
- U.S. Laws on Trafficking in Persons. (2015, September 22). *U.S. Laws on Trafficking in Persons*. Retrieved from U.S. Laws on Trafficking in Persons: <https://www.state.gov/j/tip/laws/>. Diakses pada 3 April 2021.
- Voice of America. (2018, September 14). *Jumlah Penduduk Asing di AS Capai Rekor Tertinggi dalam Satu Abad*. Indonesia: VOA Indonesia. Diakses pada 29 Mei 2021.